

ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMBERIAN KREDIT PADA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDes) BINA USAHA DESA KEPENUHAN BARAT

**Pirdaus
Program Studi S1 Akuntansi
Fakultas Ekonomi
Universitas Pasir Pengaraian
Pirdaus2001@yahoo.com**

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas sistem pengendalian intern dalam pemberian kredit pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bina Usaha Desa Kepenuhan Barat. Pengendalian intern merupakan fungsi yang sangat vital dalam proses manajemen perusahaan, merupakan suatu proses pencapaian tujuan tertentu yang telah ditetapkan sebelumnya, dan merupakan suatu rangkaian tindakan yang dilakukan serta menjadi suatu bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam suatu perusahaan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisa deskriptif. Semua data yang terkumpul kemudian dikelompokkan menurut jenisnya masing-masing serta dianalisis dan dibandingkan dengan teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas untuk memecahkan pokok permasalahan dengan tujuan menarik suatu kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa proses persetujuan kredit didominasi direktur dalam menentukan calon nasabah yang berhak memperoleh pinjaman, penentuan jumlah *plafond* kredit yang disetujui oleh pihak BUMDes Bina Usaha disesuaikan dengan jaminan calon nasabah, dan proses pencairan pinjaman menggunakan bukti transaksi berupa kuitansi disertai dengan Surat Perjanjian Pemberian Kredit (SP2K). Pihak BUMDes melakukan seleksi calon nasabah dengan tujuan untuk memastikan bahwa kredit yang disalurkan tepat sasaran, dalam proses pemberian kredit direktur ikut melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan permohonan kredit, dan proses analisis kredit dilakukan dengan melakukan pengecekan langsung terhadap tempat usaha, jaminan (agunan), dan kondisi calon nasabah.

Kata kunci: pengendalian intern, *plafond* kredit, kuitansi, analisis kredit, agunan

PENDAHULUAN

Perkembangan usaha simpan pinjam pada saat ini semakin pesat sebagai lembaga keuangan dalam mengentaskan kemiskinan masyarakat semakin besar. Hal ini sesuai dengan fungsinya yaitu

merupakan suatu usaha yang dimiliki oleh suatu desa atau kelurahan yang bergerak dalam bidang peminjaman atau penyaluran dana kepada masyarakat yang membutuhkan untuk mengembangkan usahanya.

Guna menghindari terjadinya penyimpangan atau untuk menjamin pengembalian kredit oleh peminjam dibutuhkan pengendalian intern kredit yang mana tujuan pengendalian intern dapat menjaga pengelolaan kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan dapat mendorong efisiensi untuk mematuhi kebijakan manajemen.

Pengendalian intern merupakan suatu sistematis yang dibuat oleh suatu organisasi atau badan usaha yang tujuannya untuk mencapai cita-cita perusahaan. Dengan adanya sistem pengendalian intern yang baik akan menciptakan keuntungan dalam suatu kegiatan usaha. Dengan adanya sistem pengendalian membuat segala aktivitas dapat dikontrol dengan baik karena sistem pengendalian intern merupakan kebijakan dan struktur sebagai tambahan terhadap pengendalian sistem akuntansi yang telah diciptakan oleh manajemen dengan keyakinan bahwa tujuan perusahaan akan tercapai.

Lingkungan pengendalian, yaitu menetapkan corak suatu organisasi, mempengaruhi kesadaran pengendalian orang-orangnya. Lingkungan pengendalian merupakan dasar untuk semua komponen pengendalian, menyediakan struktur organisasi yang baik agar terciptanya penetapan tanggung jawab dan wewenang yang baik pula. Penaksiran resiko adalah indentifikasi entitas dan analisis terhadap resiko yang relevan untuk pencapaian tujuannya, untuk menentukan bagaimana resiko harus dikelola.

Aktifitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang membantu menjamin bahwa arahan manajemen dilaksanakan. Informasi dan komunikasi adalah pengidentifikasian, penangkapan dan pertukaran informasi dalam suatu bentuk dan waktu yang memungkinkan orang melaksanakan tanggung jawab mereka.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah “Apakah sistem pengendalian intern pemberian kredit pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Bina Usaha di Desa Kepenuhan Barat telah berjalan secara efektif?”

Batasan Masalah

Untuk menghindari agar permasalahan tidak keluar dari pokok permasalahan yang telah dibuat dalam perumusan masalah maka dalam penelitian ini penulis membatasi permasalahan menyangkut tentang prosedur pemberian kredit, analisis pengendalian intern dalam pemberian kredit dan penyelesaian kredit bermasalah.

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efektifitas sistem pengendalian intern dalam pemberian kredit pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Bina Usaha Desa Kepenuhan Barat.

LANDASAN TEORI

Menurut Mulyadi (2002:180) definisi pengendalian intern sebagai berikut:

Pengendalian intern adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen dan personil lainnya yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang keadaan laporan keuangan, kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, efektifitas dan efisiensi operasi.

Tujuan pokok dari sistem pengendalian intern dalam suatu perusahaan dapat dibedakan dalam empat tujuan pokok, yaitu :

1. Menjaga kekayaan organisasi
2. Mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi
3. Mendorong efisiensi

4. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen.

Pengendalian intern merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan tertentu. Pengendalian intern sendiri bukan merupakan suatu tujuan. Pengendalian intern merupakan suatu tindakan yang bersifat pervasif dan menjadikan bagian yang tidak terpisahkan. Pengendalian intern dijalankan dari setiap jenjang organisasi, yang mencakup dewan komisaris, manajemen, dan personil lainnya.

Menurut Boyton dkk (2003:373) pengertian pengendalian intern (*internal control*) sebagai berikut :

Pengendalian intern adalah suatu proses yang dilaksanakan oleh dewan komisaris, manajemen, dan personel lainnya dalam bentuk suatu entitas yang dirancang untuk menyediakan keyakinan memadai berkenaan dengan pencapaian tujuan dalam kategori berikut ini :

- a) Keandalan laporan keuangan.
- b) Kepatuhan terhadap hukum peraturan yang berlaku.
- c) Efektivitas dan efisiensi operasi.

Defenisi di atas mempunyai ruang lingkup yang sangat luas, tidak saja mencakup kegiatan akuntansi dan keuangan, tetapi sangat luas sampai pada setiap aspek operasi perusahaan.

Pengendalian intern merupakan tindakan-tindakan yang harus diambil dalam perusahaan untuk mengatur dan mengarahkan aktivitas-aktivitas perusahaan. Suatu perusahaan yang berjalan harus memonitor kegiatan dan hasilnya. Bagian manajemen juga harus mempunyai pandangan dan sikap profesional untuk memajukan dan meningkatkan hasil yang akan dicapai.

Menurut Amir Abadi Jusuf (2003:263), prosedur pengendalian intern

yang baik itu terdiri dari atas beberapa hal sebagai berikut :

1. Pengawasan tugas yang cukup memadai meliputi :
 - a. Pemisahan pemegang aktiva dari akuntansi.
 - b. Pemisahan otoritas transaksi pemegang aktiva yang bersangkutan.
 - c. Pemisahan tanggung jawab operasi dan tanggung jawab pembukuan.
 - d. Pemisahan tugas dalam pemrosesan dan elektronik.
1. Otorisasi yang pantas atas transaksi dan aktivitas.
2. Dokumen dan catatan yang memadai.
3. Pengendalian fisik atas aktiva dan pencatatan
4. Pengecekan independen atas pelaksanaan.

AbdulHalim(2001:189)

mengemukakan bahwa pentingnya pengendalian intern bagi manajemen bank adalah :

- a. Lingkup dan ukuran entitas bisnis semakin kompleks, hal ini mengakibatkan manajemen harus mengendalikan laporan dan analisis yang banyak jumlahnya agar peranan pengendalian dapat berjalan dengan efektif.
- b. Pemeriksaan dan penelaahan bahwa dalam sistem yang baik memberikan perlindungan terhadap kelemahan manusia dan mengurangi kemungkinan kekeliruan dan ketidak beresan yang terjadi.
- c. Pengendalian yang baik akan mengurangi beban pelaksanaan audit sehingga dapat mengurangi biaya *audit fee*.

Sedangkan bagi perusahaan pengendalian intern dapat digunakan secara efektif untuk mencegah penggelapan maupun penyimpangan. Dengan kata lain pengendalian intern

akan memberikan kepastian bahwa penggelapan laporan keuangan dapat dicegah atau dideteksi lebih dini.

Menurut Teguh Pudjo Mulyono (2001:24) pengetahuan pengendalian intern kredit sebagai berikut :

Pengendalian kredit adalah salah satu fungsi manajemen dalam usahanya untuk penjagaan dan pengamanan dalam pengelolaan kekayaan bank dalam bentuk perkreditan yang lebih baik dan efisiensi, guna menghindari terjadinya penyimpangan-penyimpangan dengan cara mendorong dipatuhinya kebijaksanaan-kebijaksanaan perkreditan yang telah ditetapkan serta mengusahakan penyusunan administrasi perkreditan yang benar.

Aspek-aspek yang perlu diperhatikan untuk menjamin sistem pengendalian intern yang efektif dalam menangani transaksi kredit adalah :

1. Permohonan kredit harus diisi sendiri oleh nasabah atau calon nasabah dengan menggunakan formulir permohonan (FKP) atau dengan surat. Data yang diperlukan sama sekali tidak diperkenankan diisi oleh bank untuk membantu dalam hal permohonan tidak mengerti cara pengisian tersebut.
2. Setiap minggu pejabat berwenang memeriksa pinjaman *over draft* dan memperhatikan rekening-rekening yang *over draft* apakah melampaui ketentuan.
3. Harus terdapat bukti tertulis dari masing-masing transaksi yang terjadi.
4. Transaksi hanya dilakukan pada nasabah yang tepat.
5. Harus ada penetapan batas maksimal dan wewenang persetujuan.

6. Persyaratan persetujuan pemberian kredit harus dianalisa.

Pengajuan Hipotesis

Berdasarkan latar belakang masalah dan telaah pustaka yang telah dikemukakan diatas maka dikemukakan hipotesis penelitian yaitu :

”Sistem Pengendalian Intern terhadap Pemberian Kredit pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Bina Usaha Desa Kepenuhan Barat belum berjalan secara efektif.”

PEMBAHASAN

Kredit atau dikenal juga dengan istilah pinjaman yang diberikan kepada debitur atau nasabah tidak selamanya selalu lancar proses pembayarannya, terkadang ada juga debitur atau nasabah yang lalai atau telat membayarnya. Dengan demikian kredit yang diberikan kepada nasabah mengandung risiko yang mungkin terjadi apabila nasabah terlambat atau bahkan tidak membayar atas kredit yang telah diterimanya. Untuk menghindari terjadinya kredit yang bermasalah maka sangat dibutuhkan adanya suatu sistem pengendalian intern terhadap kredit yang diberikan kepada nasabah.

Sistem pengendalian intern yang diterapkan dalam hal ini adalah kegiatan pengecekan secara langsung terhadap tempat usaha, jaminan (agunan), dan kondisi calon nasabah harus benar-benar dilaksanakan sesuai dengan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan oleh BUMDes.

Sistem pengendalian intern yang diterapkan dalam hal ini adalah pihak BUMDes akan melakukan seleksi terhadap semua calon debitur (calon nasabah) yang mengajukan proposal usulan pinjaman. Seleksi calon nasabah ini bertujuan untuk memastikan bahwa kredit yang disalurkan tepat sasaran dan dapat diawasi atau dikendalikan oleh pihak BUMDes sehingga tidak menimbulkan terjadinya kredit macet bagi BUMDes yang tentunya dapat merugikan nantinya. Seleksi calon

nasabah dilakukan sejak pertama kali proposal usulan pinjaman diterima oleh BUMDes.

Sesuai dengan informasi yang diterima dari BUMDes Bina Usaha dapat penulis jelaskan bahwa proses analisis kredit yang dilakukan telah mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak BUMDes sehingga kredit yang cair tepat sasaran.

Untuk lebih menjelaskan tentang penerapan sistem pengendalian intern pemberian kredit pada Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Bina Usaha Desa Kepenuhan Barat maka penulis sajikan bagan alurnya.

PENUTUP

1. Untuk memperoleh kredit (pinjaman) dari BUMDes Bina Usaha calon nasabah harus memenuhi beberapa persyaratan sebelum ada persetujuan dari direktur. Kesalahan yang terjadi dalam proses persetujuan kredit ini adalah terlalu dominannya direktur dalam menentukan calon nasabah yang berhak memperoleh pinjaman padahal pekerjaan tersebut seharusnya dikerjakan oleh staf keuangan.
2. Pihak BUMDes melakukan seleksi calon nasabah yang mengajukan proposal usulan pinjaman, tujuannya untuk memastikan bahwa kredit yang disalurkan tepat macet yang dapat merugikan BUMDes.
3. Proses analisis kredit dilakukan dengan melakukan pengecekan langsung terhadap tempat usaha, jaminan (agunan), dan kondisi calon nasabah. Proses ini mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh pihak BUMDes sehingga kredit yang cair tepat sasaran.

SARAN

1. Dalam proses pemberian kredit kepada calon nasabah direktur terlalu mendominasi dalam pelaksanaannya, jadi sebaiknya direktur tidak terlalu dominan dalam menjalankan tugas yang terkait dengan proses pemberian

kredit sehingga pihak lain juga berfungsi dengan semestinya.

2. Untuk menghindari pekerjaan yang menumpuk pada satu pihak maka sebaiknya BUMDes Bina Usaha tidak melakukan rangkap jabatan sehingga pekerjaan dapat terlaksana dengan semestinya.

Daftar Pustaka

- Antoni, Alpia. 2011. Analisis Sistem Pengendalian Intern Terhadap Pemberian Kredit Pada Usaha Ekonomi Desa Simpan Pinjam. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Riau.
- Halim, Abdul. 2001. Auditing. Dasar-Dasar Audit Laporan Keuangan. Jilid I. Edisi Revisi. Universitas Gajah Mada. Yogyakarta.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2009. Standar Profesional Akuntansi Publik. Penerbit Salemba Empat Jakarta.
- Jusuf, Amir Abadi. 2000. Sistem Informasi Akuntansi. Buku Satu. Edisi Indonesia . Penerbit Salemba Empat. Jakarta.
- Johson, Boyton. dan EIL. 2003. Modern Auditing. Jilid I. Edisi Ketujuh. Penerbit Erlangga. Jakarta.
- Kasmir, 2012. Manajemen Perbankan. Edisi revisi. Penerbit PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Mulyadi. 2001. Sistem Akuntansi. Edisi Ketiga penerbit Salemba Empat. Jakarta.